

**PERANG DAN PUPUTAN JAGARAGA SERTA AKIBATNYA  
(ABAD XIX - AWAL ABAD XX)**



**Tim Penyusun**

**Prof.Dr.Phil.I Ketut Ardana, M.A.**

**Dr.I Wayan Tagel Eddy, M.S.**

**Dr.Ida Ayu Putu Mahyuni, M.Si.**

**Dra. Sulandjari, M.A.**

**Dra. Anak Agung Ayu Rai Wahyuni, M.Si.**

**LAPORAN KEMAJUAN**  
**PERANG DAN PUPUTAN JAGARAGA SERTA AKIBATNYA**  
**( ABAD XIX – AWAL ABAD XX )**

**TIM PENELITIAN DAN PENYUSUN**

Prof. Dr. Phil. I Ketut Ardhana, M.A

(.....)  


Dr. I Wayan Tagel Eddy, M.S

(.....)  

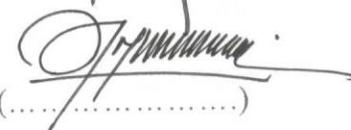

Dr. Ida Ayu Putu Mahyuni, M.Si

(.....)  


Dra. Sulandjari, M.A

(.....)  


Dra. Anak Agung Ayu Rai Wahyuni, M.Si

(.....)  


## **Pengantar**

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya tulisan ini dapat kami selesaikan dengan usaha yang optimal, meskipun harus disadari bahwa dari segi kualitas masih banyak kekurangan. Buku ini disusun dalam rangka gagasan dari berbagai pihak terhadap perlunya penulisan kembali sejarah lokal, yaitu tentang sejarah perjuangan rakyat Bali pada abad ke-19. Dengan melakukan penelitian tentang sejarah lokal selain dapat memperkaya sejarah nasional diharapkan juga dapat memperdalam pengetahuan kita tentang dinamika sosiokultural dan masyarakat Indonesia yang majemuk secara lebih mendalam. Dengan penulisan kembali sejarah lokal diharapkan juga dapat meningkatkan kesadaran sejarah dan integrasi nasional (Buku Petunjuk Sejarah Lokal 1-4 September 1982: 7; Sidemen (Dkk), 1983: 2).

Penulisan tentang perang dan puputan yang pernah terjadi di wilayah kerajaan di Bali abad XIX dalam melawan kekuasaan Belanda sesungguhnya sudah dilakukan terutama oleh penulis asing (Belanda) sendiri, namun kadar objektivitas tulisan tersebut masih perlu dilakukan penelitian dan pengamatan secara kritis. Adapun para penulis terutama dari para tim ahli yang melakukan penelitian dan penulisan kembali tentang perang Jagaraga ada yang sudah hampir setengah abad yang lalu, dan belum menyentuh dari perspektif masa kini. Dewasa ini penulisan kembali tentang sejarah perjuangan rakyat Bali termasuk perang dan puputan Jagaraga sangat perlu dilakukan. Untuk mengungkap kembali sejarah perjuangan rakyat Bali pada masa abad ke-19 hingga awal abad ke-20 ini.

Dengan menyadari, bahwa adanya kendala dalam penulisan sejarah perjuangan yang telah terjadi pada abad ke-19 ini, seperti sumber data baik sumber yang berupa informasi dari pelaku sejarah atau saksi sejarah perang dan puputan Jagaraga (sumber primer) yang terjadi abad XIX itu sudah tiada lagi, baik karena gugur dalam peperangan dan puputan maupun meninggal dunia karena usia. Adapun sumber-sumber tertulis, umumnya berupa laporan-laporan yang ditulis oleh orang Belanda yang masih sangat perlu dilakukan kritik dan interpretasi sumber. Sumber tertulis lainnya berupa usana, babad, prasasti, dan lain-lain juga semakin sulit menemukannya, meskipun masih ada tersimpan dalam beberapa perpustakaan, namun terbatasnya orang yang mengerti bahasa sumber tersebut menjadi salah satu kendala yang perlu dipahami untuk ditindaklanjuti.

Dengan alasan-alasan tersebut kiranya penulisan sejarah lokal tentang “perang dan puputan jagaraga” tersebut tetap perlu untuk ditulis kembali, Oleh karena itu dipandang perlu untuk dilakukan penelitian dan penulisan kembali tentang perang dan puputan Jagaraga serta akibatnya (abad XIX dan awal abad XX).

Penelitian, pengamatan dan penulisan kembali tentang perang dan puputan Jagaraga serta akibatnya (abad XIX dan awal abad XX), dilakukan secara saksama dan kritis, diharapkan lebih memperluas pemahaman terutama terkait dengan penyebab perang dan puputan Jagaraga, terjadinya perang dan puputan Jagaraga, serta akibat perang dan puputan Jagaraga (abad XIX dan awal abad XX). Selain itu latar belakang yang memberikan pengaruh dan berkaitan dengan kejadian-kejadian

sebelum abad ke-19 perlu kiranya diungkap secara garis besarnya, berkenaan dengan aspek politik, aspek sosial keagamaan, dan ekonomi.

Pada abad ke-19 (1849), di Jagaraga pernah terjadi dua kali perang melawan tentara Belanda, yaitu perang dan puputan Jagaraga, pertama perang Jagaraga yang dipimpin oleh Patih I Gusti Ketut Jelantik, dan puputan Jagaraga yang dipimpin oleh Jero Jempiring. Apa penyebab perang dan puputan Jagaraga?; bagaimana terjadinya perang dan puputan Jagaraga?; apa akibat serta makna perang dan puputan Jagaraga, merupakan permasalahan- permasalahan yang akan dibedah dan diungkap dalam tulisan ini.

Sehubungan dengan penulisan tentang “perang dan puputan Jagaraga serta akibatnya (abad XIX dan awal abad XX)”, perkenankan kami atas nama Tim Peneliti dan Penyusun “perang dan puputan Jagaraga serta akibatnya(abad XIX dan awal abad XX)”, mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak, yaitu:

1. Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, ~~Dr.~~I Wayan Adnyana,S.Sn.MSn, dan Bapak Kepala UPDT Monumen Perjuangan Rakyat Bali Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Drs.Putu Suka Redaya, atas kepercayaan yang diberikan serta fasilitas, berupa sarana dan prasarana yang disediakan kepada Tim Peneliti dan Penyusun“perang dan puputan Jagaraga serta akibatnya (abad XIX dan awal abad XX)”.
2. Ibu Ida Ayu Anom Dharmesti, SE., dan Ibu Anak Agung Ayu Dwi Yuni Pritiari,S.S.,M.Si., selaku tim pendamping dan Pelaksana Teknis Kegiatan

Pengelolaan Koleksi Monumen Perjuangan Rakyat Bali Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, atas atensi, partisipasi, dukungan, serta waktu dan kesempatan yang diluahkan selama penelitian lapangan dilakukan.

3. Bapak Koprodi Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Dr.I Nyoman Sukiada, M.Hum atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Tim kami serta Bapak dan Ibu Tim peneliti dan penyusun perang dan puputan Jagaraga, serta akibatnya (abad XIX-awal abad XX), yang terdiri dari, Prof.Dr.I Ketut Ardana, M.A. sebagai tim ahli; Dr. I Wayan Tagel Eddy, M.S. Sebagai tim Ahli Madya; Dr.Ida Ayu Putu Mahyuni, M.Si.sebagai tim ahli madya; Dra. Sulandjari,M.A. sebagai asisten Ahli; Dra.Anak Agung Ayu Rai Wahyuni, M.Si sebagai asisten ahli yang sudah bekerja maksimal, sehingga buku tentang perang dan puputan Jagaraga serta akibatnya (abad XIX dan awal abad XX) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dengan penerbitan buku tentang “perang dan puputan Jagaraga serta akibatnya (abad XIX dan awal abad XX)” ini diharapkan para pembaca, para generasi penerus bangsa ini tidak hanya mengetahui perjuangan rakyat dalam mempertahankan tanah airnya, namun juga mampu menghormati jasa-jasa para pejuang, mampu memahami bahwa perjuangan rakyat Bali berupa perang dan puputan Jagaraga serta akibatnya yang pernah terjadi di Jagaraga pada abad ke-19 itu, bukan hanya bersifat lokal kedaerahan, namun juga memiliki makna yang bersifat universal, dalam kerangka sejarah Indonesia. Jagaraga adalah suatu wilayah secara geografis merupakan kesatuan wilayah Nusantara, sekarang adalah

meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, akhirnya para generasi penerus bangsa diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur para perjuang rakyat Bali tersebut dalam membela tanah air, bangsa dan negara Indonesia secara menyeluruh sesuai dengan situasi atau kondisi dan kepentingan masyarakat dimasa sekarang maupun dimasa mendatang.

Kami sangat menyadari buku ini masih kurang memadai seperti yang diharapkan, oleh karena itu diharapkan saran yang bersifat perbaikan maupun pelurusan bila dianggap masih kurang atau terdapat kekeliruan baik dalam bentuk, isi maupun maknanya sehingga penulisan berikutnya kekurangan-kekurangan penulisan tentang “perang dan puputan Jagaraga serta akibatnya (abad XIX dan awal abad XX) tidak terulang lagi.

Denpasar, 2019

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

### Halaman

**Pengantar**.....

**BAB I PENDAHULUAN**.....

**BAB II FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERANG PUPUTAN JAGARAGA**

2.1. Perkenalan dan Hubungan Perdagangan

2.2. Hak Tawan Karang

2.3. Perang Buleleng

**BAB III PERANG DAN PUPUTAN JAGARAGA**

3.2. Perang Jagaraga

3.3. Puputan Jagaraga

**BAB IV AKIBAT SERTA MAKNA PERANG DAN PUPUTAN JAGARAGA**

**4.1. Akibat Perang dan Puputan Jagaraga**

4.1.1. Perubahan Sistem Pemerintahan, Status dan Sistem Ekonomi

4.1.2. Perkembangan Pendidikan dan Organisasi Pergerakan

4.1.3. Lahirnya Ide-Ide Nasionalisme

**4.2. MAKNA PERANG PUPUTAN JAGARAGA PERSPEKTIF MASA KINI**

4.2.1. Makna Tautan antara Pemimpin dengan Pengikut dalam Perang dan Puputan Jagaraga.

4.2.2. Makna Filosofi Ajaran Agama Hindu dalam Perang dan Puputan Jagaraga.

4.2.3. Makna Perang dan Puputan Jagaraga dalam Kerangka Sejarah Indonesia dan Kepribadian Bangsa Indonesia.

4.2.4. Makna Kesetaraan Gender dalam Perang dan Puputan Jagaraga

4.2.5. Upaya Pihak-Pihak Terkait dalam Memaknai Perang dan Puputan Jagaraga

**BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR INFORMAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN-SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Penyebab terjadinya perang dan puputan Jagaraga pada abad ke-19, tidak dapat dilepaskan dari usaha pemerintah Hindia Belanda untuk memperluas pengaruhnya, dengan beberapa kali mengirimkan utusan untuk mendapatkan pengaruh yang luas dalam bidang politik. Kontrak-kontak politik itu akhirnya didapatkan. Kontrak-kontrak berupa perjanjian-perjanjian yang memberikan pengakuan atas kekuasaan pemerintah Hindia Belanda itu, seperti: kontrak perjanjian-perjanjian dengan Badung, dengan Karangasem, dengan Buleleng, dan kontrak perjanjian dengan Klungkung. Adapun isi kontrak pada dasarnya menyatakan, bahwa raja-raja tersebut menyatakan daerahnya berada dibawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, dan raja-raja itu berjanji tidak akan menyerahkan wilayahnya itu kepada bangsa asing lainnya (Utrecht, 1962: 171-172; Arsip Nasional, Surat-Surat Perjanjian, 191-141; lihat Parimatha (Dkk), 2015: 364).

Selain kontrak perjanjian tersebut, dibuat juga kontrak antara pemerintah Kolonial Belanda dengan raja-raja di Bali (raja Klungkung, raja Badung, raja Buleleng, dan juga raja Lombok). Isi perjanjian, antara lain, menghapuskan hukum tawan karang (Utrecht, 1962: 174; Lekkerkerker, 1923: 317). Rupanya perubahan isi kontrak yang awalnya bersifat dagang kemudian menjadi politik. Dengan adanya kontak perjanjian ini, menyebabkan raja-raja di Bali sangat kecewa, karena raja-raja di Bali sesungguhnya menginginkan hubungan perdagangan atau persahabatan bukan hubungan penaklukan atau penundukan. Raja Buleleng dan Karangasem menyatakan menolak dihapuskannya hukum tawan karang karena hal itu dianggap merendahkan martabat raja (Kartidirdjo, 1975: 191).

Usaha Belanda untuk menekan raja Buleleng agar mengesahkan perjanjian penghapusan tawan karang telah ditolak. Atas alasan ditolaknya penghapusan tawan karang tersebut, pihak Belanda berusaha mencari jalan agar dapat meruntuhkan peraturan yang menghalanginya. Belanda berusaha membuat rekayasa, suatu propokasi dilakukan dengan membuat pancingan pada tahun 1844, kapal dagang berbendera Belanda tiba-tiba terdampat di Pantai Sangsit (Buleleng), sesuai dengan aturan tawan karang, kapal itu dirampas oleh penduduk. Atas peristiwa tersebut Belanda menuntut raja Buleleng untuk mengganti kerugian atas kapal-kapal Belanda yang dirampas. Raja Buleleng tidak mengindahkan tuntutan Belanda (Parimatha, 2015: 365).

Patih Buleleng I Gusti Ketut Jelantik dengan tegas menyatakan, bahwa tuntutan tersebut tidak mungkin dapat diterima. Atas penolakan itu, Belanda menyerang Buleleng dengan mendatangkan pasukannya. Kedatangan

pasukan Belanda itu mendapat perlawanan dari raja dan rakyat Buleleng, sehingga kemudian peristiwa ini juga mengakibatkan perang-perang di Buleleng tahun 1846-1849. Karena raja tidak mau ditundukkan, maka meletuslah perang di Buleleng tahun 1846, dan banyak pula jatuh korban di pihak Belanda, istana raja dibakar, raja belum menyerah. Setelah hancurnya kerajaan Buleleng pada 28 Juni 1846, kemudian raja serta patih I Gusti Ketut Jelantik berinisiatif untuk mengungsi bersama kerabat dan pasukan Buleleng yang masih hidup. Untuk sementara pihak raja memilih berdamai dengan Belanda (Kartodirdjo, 1975: 193).

Dalam perang perlawanan Kerajaan Buleleng menghadapi pasukan Belanda, menyebabkan banyak korban yang jatuh termasuk dari pihak tentara Belanda. Hancurnya Kerajaan Buleleng atas serangan tentara Belanda, pihak raja menyatakan berdamai. Kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh raja Buleleng beserta patih I Gusti Ketut Jelantik makin giat memperkuat angkatan perangnya selama 2 tahun, membuat dan memperkuat benteng dengan sistem "Supit Surang" atau "Supit Urang", yang dipusatkan di Desa Jagaraga. Untuk menambah jumlah laskar didatangkan bantuan dari Kerajaan Klungkung, Gianyar dan Mengwi (Team Penyusun Naskah Dan Pengadaan Buku Sejarah Bali Daerah Tingkat I Bali, 1980: 80). Hal ini dilakukan untuk berjaga-jaga terjadinya serangan lagi dari pasukan Belanda. Perkiraan pihak kerajaan Bali benar, karena pihak Belanda juga memperkuat ekspedisi kedua. Jika ekspedisi pertama berkekuatan 1700 orang, ekspedisi ini berkekuatan 2265 orang (Weitzel, 1959: 19; lihat Kartodirdjo, 1975: 195).

Setelah pusat benteng pertahanan Kerajaan Buleleng dipindahkan ke Jagaraga, kembali pada 8 Juni 1848, Belanda mengadakan serangan pertama terhadap benteng Jagaraga dengan melancarkan tembakan-tembakan meriam dari atas kapal maupun pasukan daratnya. Karena pihak Belanda belum menguasai strategi dan medan pertempuran di Jagaraga, maka pasukan Belanda berhasil di pukul mundur oleh pasukan Kerajaan Buleleng yang terdiri dari pasukan gabungan. Dengan ditariknya kembali pasukan Belanda, pasukan Bali sempat menyusun kembali kekuatan laskar dan benteng pertahanannya di Jagaraga.

Pada ekspedisinya ketiga ini, pasukan Belanda semakin diperkuat lagi. Di bawah pimpinan Mayor Jenderal Michiels dan Letnan Kolonel De Brauw ekspedisi Belanda yang ketiga kalinya menyerang benteng pertahanan di Jagaraga pada tanggal 15 April 1849, mendarat di Pantai Sangsit, dan langsung mengadakan serangan. Kali ini penyerangan Belanda dilakukan dari dua arah, yaitu dari depan dan dari belakang. Akhirnya Belanda berhasil mengurung benteng Jagaraga. Dalam situasi yang genting itu, Patih Jelantik berhasil meloloskan diri bermaksud untuk menyusun strategi pertahanan yang lebih kuat. Namun dengan tidak terduga, Jero Jempiring menggantikan memimpin laskar di Jagaraga hingga akhir pertempuran, dan gugur bersama pengikutnya di medan perang melalui "puputan".

Berakhirnya perang dan puputan Jagaraga, membawa akibat-akibat terhadap perubahan sistem pemerintahan, status, ekonomi perdagangan, pendidikan, dan munculnya ide-ide nasionalisme di kalangan masyarakat Bali Utara (Buleleng). Pemerintahan pada masa kerajaan di Bali, dapat dilihat melalui sistem birokrasi tradisional (lihat Putra Agung: 22). Sebelum pemerintah Hindia

Belanda berkuasa di Bali kedudukan dan kekuasaan raja pada waktu itu sangat tinggi, raja memiliki kewenangan. Seorang raja atau pemimpin dalam dalam mengamalkan tugasnya sebagai pelindung dan pengendali suatu kerajaan yang dikuasainya. Raja pada hakekatnya merupakan tokoh yang mulia, agung, dan patut dijadikan panutan dalam bertingkah laku. Tipe idola seorang raja atau pemimpin sesuai dengan ajaran *Asta Brata*, yakni delapan asas utama yang digunakan landasan kepemimpinan oleh seorang raja atau pemimpin (Ardika (Dkk), 2015: 132-135).

Pada masa penjajahan kolonial Belanda terjadi perubahan status. Pemerintah Belanda masih memfungsikan pemerintahan tradisional, tetapi dilihat dari struktur pemerintahannya, kedudukan raja berada dibawah seorang *kontrolir* (Kartidirdjo (DKK), 1987: 11-25). Nama raja diganti dengan nama *regent*. Sebelumnya raja memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur pemerintahan. Penjajahan Belanda menyebabkan raja tidak lagi mempunyai kekuasaan penuh karena dalam melaksanakan pemerintahan selalu diawasi oleh kontrolir. Raja semata-mata hanya pegawai yang diangkat dan digaji oleh kolonial Belanda, dan langsung minta saran atau pandangan kepada kontrolir, bukan lagi kepada patih.

Apabila raja berbuat salah atau kurang berkenan di hati pemerintah kolonial Belanda, langsung dipecat atau diasingkan ke daerah lain. Jabatan-jabatan seperti residen, asisten residen, kontrolir, dan lain-lain, tidak pernah dijabat oleh orang-orang pribumi (Buleleng). Jabatan tertinggi yang diduduki elit-elit Buleleng adalah jabatan regent. Orang-orang Buleleng hanya menduduki jabatan pelengkap. Secara

politik pemerintah kolonial Belanda ingin mempertahankan kedudukannya sebagai negara penjajah (Sara Partama, 1992: 161).

Akibat Singaraja menjadi kota pelabuhan dan dagang telah menimbulkan perubahan-perubahan dalam sosial budaya di wilayah tersebut. Masyarakat Buleleng menjadi bersifat dinamis dan terbuka dengan dunia luar, menyebabkan perubahan cara berpikir dari masyarakat agraris (Petani) ke masyarakat perdagangan. Setelah Singaraja menjadi pusat perdagangan, sistem uang mulai dikenal. Sejalan dengan perkembangan perdagangan pada permulaan abad ke-19, perdagangan di Buleleng semakin ramai. Dengan masuknya ekonomi uang dan akibat kemajuan kota Singaraja sebagai kota pelabuhan dan dagang, banyak penduduk Buleleng mulai meninggalkan pertanian terjun ke lapangan perdagangan (Sara Partama, 1992:170); lihat Putra Agung, 2001: 63).

Untuk kepentingan tenaga administrasi , pemerintah Belanda pada tahun 1875 di Singaraja membuka pendidikan modern, seperti Tweede Klase School, kemudian Eeste Inlandesche School, dan HIS pada tahun 1913. Pada waktu itu banyak pula pelajar-pelajar Bali yang melanjutkan ke Jawa pada tahun 1927, pada sekolah MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijds), AMS (Algemeene Middelbare Sschool), di Kweekschool, Ambachtshool, Nederkadsch Indische Artsenschool, OSVIA (Opleidingsschool Voor Inlansche Anternaren), dan di HMS (Moorgere Kweekshool) (Surya Kanta, 1927: 34; lihat Putra Agung 2001: 88). Akibatnya pemerintah Belanda mulai curiga terutama terhadap pelajar-pelajar Bali yang melanjutkan ke Probolinggo karena khawatir pelajar-pelajar Bali mulai tertarik terhadap masalah-masalah nasionalisme, hingga akhirnya mengeluarkan

larangan bagi para pelajar Bali untuk diterima di sekolah-sekolah yang ada di Probolinggo.

Dalam perkembangannya, pendidikan modern telah mendorong masyarakat Bali, khususnya yang dimotori oleh kaum pelajar yang kebanyakan berasal dari golongan Sudra untuk melakukan perubahan-pembaharuan dalam agama dan adat istiadat yang dianggap masih kolot dan menyesatkan. Pendidikan modern juga mendorong lahirnya ide-ide nasionalisme.

Perang dan puputan Jagaraga yang pernah terjadi pada abad ke-19 serta akibatnya sampai awal abad ke-20 mengandung beberapa makna yang relevan dengan masa kini, seperti makna tautan antara pemimpin dengan yang dipimpin, makna filosofi Agama Hindu dalam perang dan puputan Jagaraga, makna perang dan puputan Jagaraga sebagai kerangka sejarah Indonesia dan salah satu bentuk kepribadian bangsa Indonesia, makna kesetaraan gender dalam perang dan puputan Jagaraga, dan upaya dari pihak-pihak terkait dalam memaknai perang dan puputan Jagaraga. Semua makna dan hakekat yang terkandung di dalamnya, diharapkan dapat dipahami, ditauladani, dihargai, diperkenalkan kepada generasi penerus bangsa ini, melalui suatu upaya yang dilakukan terutama oleh pihak-pihak terkait.

Salah satu contoh nyata adalah dengan berdirinya sebuah monumen perang dan puputan Jagaraga oleh dinas terkait, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Hal ini merupakan suatu respon positif untuk dapat dikenal terutama oleh masyarakat Jagaraga, Buleleng, masyarakat Bali dan masyarakat Indonesia, bahwa di tempat itu, pada abad ke-19 pernah terjadi perang yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik dan puputan yang dipimpin oleh Jero Jempiring melawan pasukan tentara

Belanda dengan kekuatan perang yang jauh lebih modern. Semua ini dilakukan untuk membela tanah air, membela harga diri atas dasar kebenaran .

#### **4.2. Saran-Saran**

1. Penulisan kembali sejarah perjuangan seharusnya dibudayakan kepada generasi penerus bangsa, terutama di kalangan akademisi, agar nilai-nilai dan makna perjuangan tidak mudah punah. Dengan adanya budaya untuk menulis kembali sejarah perjuangan rakyat dalam perang melawan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, maka diharapkan nilai-nilai dan makna di balik perang dan puputan rakyat Bali itu dapat dikenal, dipahami dan ditauladani oleh generasi penerusnya, seperti jiwa patriotisme, semangat, toleransi yang tinggi, memupuk tautan antara pemimpin dan yang dipimpin agar selalu mempertahankan keseimbangan yang berlandaskan atas filosofi agama, dan norma-norma yang berlaku. Dengan ini diharapkan generasi berikutnya dapat menghargai para pejuang atau para pahlawan yang telah berjuang sebagai patriot kusuma bangsa dan negara. Kemudian mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai yang telah diwariskan dalam mengisi kemerdekaan melalui pembangunan dalam segala bidang.
2. Pihak-pihak terkait, seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, Pemerintah Daerah Provinsi Bali, dan masyarakat Desa Jagaraga khususnya, untuk tetap berkomitmen melastarikan nilai-nilai perang dan puputan Jagaraga. Dengan komitmen bersama antara masyarakat Jagaraga dengan pemerintah daerah Buleleng, pendirian "Moumen Perang Jagaraga", yang merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat Jagaraga khususnya, pemerintah daerah

Kabupaten Buleleng, dan Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Agar dapat melestarikan nilai-nilai perjuangan dalam perang dan puputan Jagaraga, maka peran aktif dan perhatian para tokoh dan masyarakat Jagaraga dengan dinas-dinas terkait di pemerintah daerah Kabupaten Buleleng, baik dinas sosial, kebudayaan dan pariwisata sangat perlu terus ditingkatkan. Sehingga monumen perang Jagaraga tersebut dapat dikembangkan sebagai sarana pendidikan para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat secara lebih luas. Selain dapat digunakan sebagai saluran ejuikasi untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan para tokoh dalam perang dan puputan Jagaraga, seperti Patih I Gusti Ketut Jelantik dan Jero Jempiring. monumen perang Jagaraga juga dapat dikembangkan sebagai objek wisata sejarah yang juga dapat dikenal oleh masyarakat dunia. Hal ini sudah terbukti, namun komitmen untuk melestarikan nilai-nilai sejarah perjuangan rakyat Bali, khususnya yang pernah terjadi di Desa Jagaraga, harus terus ditingkatkan agar keberadaan dan fungsi dari monumen perang Jagaraga tetap eksis sepanjang masa.